



PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A

# RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2023



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur atas Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah pedoman dalam menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (datu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahun 2023 dapat selssai dengan baik tidak terlepas dari Kerjasama semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun Anggaran 2023 ini, untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas sumbangan pemikiran dan tenaga sehingga Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dapat disusun.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat kami harapkan sebagai penyempurnaan penyusunan RKT di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi tolak ukur serta acuan bagi kita semua terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2023. Semoga semua langkah dan upaya kita selalu mendapat bimbingan dan Ridho dari Allah SWT.

Pontianak, 9 Januari 2023

**Ketua Pengadilan Negeri Pontianak**



**H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19711101 199303 1 002**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
<b>BAB II .....</b>	<b>3</b>
<b>RENCANA KINERJA TAHUNAN.....</b>	<b>3</b>
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 .....	4
<b>BAB III.....</b>	<b>13</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>13</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, perencanaan kinerja menjadi kunci utama yang harus menjadi perhatian dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaanrenstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui kegiatan tahunan. Penyusunan dokumen dilakukan selaras dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Tambahan, dan target yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan.

Dalam SAKIP terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah salah satu sub komponen yang harus ada dari komponen Perencanaan Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA.

RKT Tahun 2023 ini merupakan bagian dari rencana implementasi program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA dengan harapan semua kegiatan

menjadi terarah dan terukur untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Instansi. Penyusunan RKT Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Penyusunan RKT Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA Tahun 2023 adalah memberikan gambaran langkah – langkah atas program dan kegiatan yang menjadi target kinerja di tahun 2023, dengan harapan dapat memberikan informasi rencana kinerja yang terukur kepada pemberi mandat maupun unit atas kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA di tahun 2023.

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam rencana strategis. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program utama adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi / keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan penetapan Kinerja (PK).

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT adalah :

1. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan;
2. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa output / keluaran maupun outcome / hasil;
3. Indikator kinerja output / keluaran adalah sesuatu berupa produk / jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;
4. Indikator outcome / hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Negeri Pontianak Kelas IA adalah sebagaimana tergambar pada matriks berikut :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023**  
**NO. W17-U1/253/OT.01.1/I/2023**  
**PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	92%
2.		Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	92%
3.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	92%
4.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	92%
5.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	83%
6.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	83%
7.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%
8.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85
9.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	1%
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%
11.		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100%
12.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
13.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100%
14.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%

16.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%
17.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
18.	Meningkatnya terhadap Pengadilan	Kepatuhan Putusan Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%
19.		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	40%
20.	Terlaksananya Administrasi dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi	Persentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	97%
21.		Persentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	97%
22.		Persentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	100%
23.		Persentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib	97%
24.		Persentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	97%
25.		Persentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	98%
26.	Peningkatan Peradilan Umum	Persentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	98%
27.		Persentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	80%

**TARGET KINERJA DAN PENDANAAN RENCANA KINERJA TAHUN 2023  
PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS IA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN	KET
				2020	2021	2022	2023	2024							
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	92%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	900	Perkara	Rp. 14.579.993.000	
		b.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	92%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan tepat waktu	40	Perkara	Rp. 53.960.000	
		c.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	92%	92%		Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	750	Perkara	Rp. 285.000.000	
		d.	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	90%	90%	92%	92%		Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	60	Perkara	Rp. 60.000.000	

									Percepatan Penyelesaian Perkara				Rp. 20.000.000	
e.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80%	80%	80%	83%	83%			Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang mengajukan upaya hukum Banding	40	Perkara	Rp. 6.450.000	
f.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80%	80%	80%	83%	83%			Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang mengajukan upaya Hukum Kasasi dan PK	25	Perkara	Rp. 5.200.000	
g.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	10%	10%	10%	10%			Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1	Perkara		
h.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	80%	80%	80%	85%	85%			Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Survei Layanan Peradilan	90	Sangat Baik	Rp. 14.579.993.000	
									Program Penegakan dan Pelayanan Hukum				Rp. 498.300.000	

		i.	Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restotatif	-	-	1%	1%	1%		Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Perkara yang diselesaikan menggunakan Pendekatan Keadilan Restotatif	1	Perkara	Rp. 285.000.000	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	90%	90%	90%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah Salinan putusan Perdata yang dikirim tepat waktu	900	Perkara	Rp. 14.579.993.000	
		b.	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	-	-	90%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Salinan putusan Perdata Khusus yang dikirim tepat waktu	40	Perkara	Rp. 53.960.000	
		c.	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	90%	90%	90%	100%	100%		Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah Salinan putusan Pidana yang dikirim tepat waktu	750	Perkara	Rp. 285.000.000	
		d.	Persentase Salinan Putusan	-	-	90%	100%	100%		Perkara Pidana Korupsi yang	Jumlah Salinan putusan Pidana Khusus	60	Perkara	Rp. 60.000.000	

			Perkara Pidana Khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu						diselesaikan ditingkat pertama di Wilayah Tengah	yang dikirim tepat waktu				
									Percepatan Penyelesaian Perkara					Rp. 20.000.000
		e.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	10%	7%	5%	5%	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi	5	Perkara		Rp. 14.579.993.000
<b>3.</b>	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	2	Perkara		Rp. 1.340.000
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	100%	100%		Sidang di luar Gedung Pengadilan	36	Perkara		Rp. 30.000.000
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	90%	90%	90%	100%	100%		Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	180	Orang		Rp. 48.000.000

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	60%	60%	40%	40%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Tengah	Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	1	Perkara	Rp. 53.960.000
		b.	Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	60%	60%	60%	40%	40%			Jumlah putusan perkara perdata khusus yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	1		
5.	Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	a.	Presentase Pelaksanaan Urusan Kepegawaian yang tertib	-	-	-	97%	97%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	Rp. 14.579.993.000	
		b.	Presentase Pelaksanaan Urusan Keuangan yang tertib	-	-	-	97%	97%						
		c.	Presentase Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Program, dan Anggaran yang efektif dan efisien	-	-	-	100%	100%						
		d.	Presentase Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat,	-	-	-	97%	97%						

			Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan yang tertib										
		e.	Presentase Pelaksanaan Pengolahan Teknologi Informasi dan Statistik yang baik	-	-	-	97%	97%					
		f.	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Negeri Pontianak	-	-	-	98%	98%					
<b>6.</b>	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	a.	Presentase Pelaksanaan Realisasi Anggaran Peningkatan Manajemen	-	-	-	98%	98%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		Rp. 498.300.000

		Peradilan Umum												
	b.	Presentase Hakim dan Aparatur yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	-	-	80%	80%							

Keterangan :

 = target tahun berjalan

Pontianak, 9 Januari 2023

**Ketua Pengadilan Negeri Pontianak**



**H. AKHMAD FIJARSYAH JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.**  
**NIP. 19711101 199303 1 002**

## **BAB III PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan mediasi untuk menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional sehingga dapat membantu pencapaian pelaksanaan program. Dan juga dapat menjadi suatu *performance agreement* sehingga memudahkan proses pengukuran kinerja, dapat membantu untuk monitoring dan mengevaluasi kegiatan, serta dapat membantu menetapkan rencana kinerja periode berikutnya.




SCAN ME

## RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS 1A

 Jln. Sultan Abdurrahman No. 89, Pontianak

 (0561) 734 100, FAX (0561) 763 214, 763 196

 pengadilannegeriptk@gmail.com

 0813 5048 5634 (Layanan Pengaduan)

 0812 5775 8489 (INDI Whatsapp Bot)